

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penghapusan barang inventaris berupa peralatan dan mesin pada tahun 2019-2021 mengalami kenaikan pada tahun 2020 dan penurunan pada tahun 2021 dikarenakan perbedaan permintaan permohonan penghapusan barang milik daerah di tahun yang bersangkutan
2. Rekapitulasi anggaran belanja untuk penghapusan barang milik daerah pada tahun 2019-2021 mengalami kenaikan pada tahun 2020 dan penurunan pada tahun 2021. Perbedaan anggaran belanja tersebut dikarenakan penganggaran belanja yang berbeda di tahun yang bersangkutan.
3. Kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penghapusan barang milik daerah yaitu :
 - a. Dokumen kepemilikan atau perolehan barang tidak lengkap
 - b. Tidak ada wujud fisik atas barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan penghapusan
 - c. Kurang maksimalnya pengawasan dan pengamanan barang milik daerah yang rusak berat
 - d. Terjadinya miskomunikasi antar staf berkaitan dengan surat disposisi pelaksanaan penghapusan aset
4. Solusi terhadap kendala dalam pelaksanaan penghapusan barang milik daerah pada BPKAD Kota Padang
 - a. Untuk dokumen kepemilikan atau perolehan barang yang tidak lengkap, maka dokumen tersebut harus dicari oleh pengelola barang
 - b. Untuk barang yang akan dihapuskan tetapi tidak ada wujud fisiknya maka barang tersebut harus dituangkan ke dalam berita acara agar menjadi bukti Ketika akan melakukan penghapusan barang milik daerah

- c. Terkait dengan kurang maksimalnya pengawasan dan pengamanan barang milik daerah yang rusak berat, BPKAD Kota Padang diharapkan bisa mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya pengawan dan pengamanan barang milik daerah agar tidak terbengkalai dan dapat di proses sesuai dengan aturan yang berlaku
- d. Untuk menghindari miskomunikasi antar staf diharapkan BPKAD Kota Padang mengadakan sosialisasi mengenai proses pelaksanaan penghapusan barang milik daerah agar dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam proses pelaksanaan penghapusan barang milik daerah.

5.2 Saran

1. BPKAD Kota Padang diharapkan lebih teliti lagi dalam melakukan penghapusan barang milik daerah agar meminimalisir terjadinya kendala-kendala yang seharusnya tidak terjadi.
2. BPKAD Kota Padang diharapkan lebih memperhatikan kelancaran komunikasi antar stafnya agar terjadinya kelancaran dalam proses penghapusan barang milik daerah dan tidak terjadi miskomunikasi antar pejabat maupun staf BPKAD Kota Padang.
3. BPKAD Kota padang seharusnya lebih transparan dan terbuka dalam mempublikasikan data agar masyarakat umum dapat melihat bagaimana pelaksanaan penghapusan barang milik daerah yang terjadi pada BPKAD Kota Padang. BPKAD Kota Padang diharapkan agar memperbaharui dan melengkapi informasi yang ada di situs internet BPKAD Kota Padang agar informasi-informasi yang dibutuhkan bisa tersedia dan diakses oleh masyarakat umum.